

# ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN PENDAPATAN DESA ( STUDI KASUS DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO)

*by* Risma Chindya Pratami

---

FILE	JURNAL_RISMA_CHINDYA.PDF (157.98K)	WORD COUNT	1999
TIME SUBMITTED	16-JUL-2020 12:02PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	12841
SUBMISSION ID	1358108168		

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAHAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DAN PENDAPATAN DESA ( STUDI KASUS DESA TAMBAK SUMUR  
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO)**

Risma Chindya Pratami

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [chindyarisma38@gmail.com](mailto:chindyarisma38@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “ Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Pendapatan Desa ( Studi Kasus Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ) bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa pada Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa yang ada di Desa Tambak Sumur sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ada sedikit kendala yang terdapat pada Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu pencairan dana yang tertunda dari pemerintah, sehingga perangkat desa sangat sulit dalam penyusunan APBDes.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Pendapatan Desa

**ABSTRACT**

The study entitled "Accountability Analysis in Managing Village Fund Allocation (ADD) and Village Income (Case Study of Tambak Sumur Village, Waru Subdistrict, Sidoarjo Regency) aims to find out how Village Fund Allocation and Village Income is allocated to Tambak Sumur Village, Waru Subdistrict, Sidoarjo Regency. The method used in this study uses descriptive qualitative methods and the data collection the authors make observations, interviews and documentation. The results of this study are the responsibility of the Village Fund Allocation and Village Income in Tambak Sumur Village has been going well and in accordance with applicable regulations. However, there are a few obstacles in Tambak Sumur Village, Waru Subdistrict, Sidoarjo Regency, namely the disbursement of funds delayed from the government, so that village officials are very difficult in preparing the APBDes .

Keywords : Accountability, Village Fund Allocation (ADD), and Village Income

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah-wilayah, provinsi, kabupaten dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari kecamatan dan kecamatan terdiri dari desa dan kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Virgie, dkk (2015:97) pengelola keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). <sup>1</sup> Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintah Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian dijawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintah yang terbesar maupun pemerintahan yang terkecil yaitu pemerintahan desa. <sup>1</sup> Menurut Waluyo (2016:195) Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai peranggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambak Sumur sudah efektif dan sudah mewujudkan prinsip akuntabel sejak tahun 2017. Desa Tambak Sumur salah satu Desa yang berada di Kecamatan Waru yang setiap tahunnya mendapatkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 393.842.344,60,- tahun 2018 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 398.895.433,50,- dan pada tahun 2019 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 412.588.092,00,-. Dana

yang diperoleh dari Desa Tambak Sumur bersumber dari bagian keuangan pusat dan kabupaten/kota.

Pendapatan Desa Tambak Sumur berasal dari penyewaan gedung balai desa, penyewaan ruko dan pembayaran air PDAM. Desa tersebut harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja yang baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa. Jika pendapatan desa naik maka akan diikuti naiknya belanja desa dan jika pendapatan desa turun maka akan diikuti pula dengan turunnya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Akuntansi

Menurut (Amin W :2015) akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mengidentifikasi, menghitung, mengelompokkan dan menilai sebuah kejadian yang berhubungan dengan keuangan atau kegiatan yang dapat menghasilkan data kuantitatif dan data kualitatif terutama yang bersifat keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

### Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Bastian, 2015 : 3) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya pemerintah daerah, BUMN, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo (2018:14)

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

### Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Lawton and Rose (2016) akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa menyatakan bahwa Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Pemerintah Daerah. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut (Soemantri 2017:157) tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
3. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **Pendapatan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Jenis-jenis Pendapatan Desa :

1. Pendapatan asli desa
2. Transfer desa
3. Pendapatan lain-lain

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Data**

Jenis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil pengukuran yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan yang meliputi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambak Sumur.

### **Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Primer. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti (tidak melalui perantara) data Primer diperoleh dari wawancara dengan perangkat desa atau staf-staf yang lainnya.

### **Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan setelah itu menganalisis dari hasil wawancara tersebut sehingga memberikan kesimpulan yang jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2019**

No.	Uraian	Anggaran
1.	ADD Tahun 2017	Rp. 393.842.344,60
2.	ADD Tahun 2018	Rp. 398.895.433,50
3.	ADD Tahun 2019	Rp. 412.588.092,00

Berdasarkan dari tabel diatas, pada tahun 2017-2019 Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 393.842.344,60 , tahun 2018 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 398.842.344,60 dan pada tahun 2019 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. Rp. 412.588.092,00.

**Tabel Pendapatan Desa Tambak Sumur Tahun 2017-2019**

No.	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan Tahun 2017	Rp. 2.009.573.656,05
2.	Pendapatan Tahun 2018	Rp. 1.705.864.343,50
3.	Pendapatan Tahun 2019	Rp. 1.807.603.070,00

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan yang paling banyak didapatkan pada tahun 2017. Dan Pendaatan yang paling seikit terdapat pada Tahun 2018. Dan Pendapatan Desa pada Desa Tambak Sumur setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

## PEMBAHASAN AKUNTABILITAS DAN PENDAPATAN DESA

Desa Tambak Sumur merupakan salahsatu Desa yang berada di Kecamatan Waru yang sudah menerapkan Prinsi Akuntabel sejak tahun 2017 dan sudah direncanakan sesuai dengan peraturan Bupati yang dibahas dalam rapat musrenbang dengan Pemerintah Desa. Desa Tambak sumur dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dalm bentuk laporan, seperti laporan pertanggungjawaban (LPJ), laporan realisasi anggaran dan beberapa bukti pendukung lainnya seperti kwintansi yang nantinya juga akan dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan yang ada di Desa Tambak Sumur sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Tingkat Akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pertanggungjaaban.

#### 1. Tahap Perencanaan

Proses Perencanaan di Desa Tambak Sumur menerapkan musrenbanges. Musrenbangdes yaitu forum musyawarah yang membahas perencanaan atau program pembangunan desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambak Sumur yang pertama menyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) setelah itu menyusun RAPBDes (Rencana Anggaran Belanja Desa) dan setelahnya menjadi APBDes (Anggaran endapatan Belanja Desa). Hasil penelitian yang menunjukkan dari Tahapan Perencanaan pada Desa Tambak Sumur sudah berjalan dengan baik. Perencanaan yang sudah disepakati sudah harus akuntabel dan dapat diketahui seluruh masyarakat desa dan harus dipertanggungjawabkan secara baik. jika tahap perencanaan selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tambak Sumur diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat Desa Tambak Sumur mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanannya pada Desa Tambak Sumur sudah baik dan sudah menerapkan Prinsip yang akuntabel.

#### 3. Tahapan Pertanggungjawaban

Dalam Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada Desa Tambak Sumur untuk mempunyai bukti-bukti pendukung yang sah, seperti kuintasi. Di dalam peyusunannya awalnya Pemerintah Desa Tambak Sumur merasa kesulitan dalam mengatur keuangannya, namun setelah adanya bukti-bukti pendukung yang sah, jadi semakin mudah untuk menyusun laporannya. Pemerintah Desa Tambak Sumur dikatakan akuntabel apabila sudah menuhi tanggungjawabannya kepada masyarakat.

### **KENDALA ALOKASI DANA DESA YANG DIHADAPI DESA TAMBAK SUMUR**

Pencairan Keuangannya terkadang tertunda dari kabupaten/kota. Hal ini yang membuat Desa Tambak Sumur semakin lama menyusun laporan keuangannya.



## **ANALISIS PENDAPATAN DESA TAMBAK SUMUR**

Pemerintah Desa Tambak Sumur setiap tahunnya menyusun Anggaran APBDes. Pendapatan Desa Tambak Sumur berasal dari Penyewaan Gedung Balai Desa yang dijabarkan sebesar Rp. 4.000.000 – Rp. 5.000.000 an. Pendapatan Desa tambak Sumur sudah dilaksanakan dengan baik namun ada sedikit kendala adalah keterambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga pemerintah desa sangat kesulitan dalam menyusun laporan APBDes.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan suah dikelola secara akuntabel.
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa secara umum sudah dapat dikelola secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Sidoarjomeskipun masih ada kekurangan. Namun ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desa yang masih kesulitan dalam melakukan pencatatan penyusunan pembukuan keuangan desa karena pencairan keuangannya tertunda.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat di sampaikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tambak Sumur dapat menyampaikan hasil pengelolaan dana desa Tambak Sumur sebagai bukti pertanggungjawaban.
2. Bagi pemerintah Desa Tambak Sumur dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undngan terbaru agar

pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabel.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amin Widjaja Tunggal. 2015. *Memahami Akuntansi Biaya*. Solo : Harviando.

Bastian, Indra. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi terbaru*. Yogyakarta : Andi.

Lawton dan Rose Aidan G. 2016. *Organization and management in publik sector second edition editor*. Pitman Publishing : London.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Soemantri, Bambang Trisanto. 2017. *Pedoman Penyelenggara Pemerintah Desa*.

Virgie K A, Delawilia dan Supranoto. 2015. “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 12 Nomor 2. Januari 2015 hal 94-103.

# ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN PENDAPATAN DESA (STUDI KASUS DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO)

## ORIGINALITY REPORT

% **18**  
SIMILARITY INDEX

% **19**  
INTERNET SOURCES

% **10**  
PUBLICATIONS

% **10**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	%4
2	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	%2
3	<a href="http://eprints.umpo.ac.id">eprints.umpo.ac.id</a> Internet Source	%2
4	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	%2
5	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	%2
6	<a href="http://achmushaffa.blogspot.com">achmushaffa.blogspot.com</a> Internet Source	%2
7	<a href="http://ejournal.stiesia.ac.id">ejournal.stiesia.ac.id</a> Internet Source	%2
8	<a href="http://eprint.stieww.ac.id">eprint.stieww.ac.id</a> Internet Source	%2

---

9

# Submitted to Higher Education Commission Pakistan

Student Paper

---

%2

---

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE  
BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 2%